

**LAPORAN KEUANGAN  
PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**

*Per 31 Desember 2020 & 2019*

*Serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 & 2019*

**DAN**

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**No. 00199/2.0627/AU.1/02/0324-2/1/V/2021**

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**DAFTAR ISI**

---

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan - Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Laporan Posisi Keuangan	1-2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	6-36



**PT. PERDANA KARYA PERKASA, Tbk.**

COAL MINING, PLANTATION, ENGINEERING CONSTRUCTION, HE RENTAL

Alamat : Jl. Sentosa No. 56 Samarinda 75117, Telp: 0541-771290, Fax: 0541-738099

Email : pkp@pkpk-tbk.co.id / marketing@pkpk-tbk.co.id



ISO 9001:2015 :A000972818012372  
ISO 14001:2015 :A000973518012370  
OHSAS 18001:2007 :A000974218012378

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANGTANGGUNG JAWAB  
ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020 UNTUK TAHUN YANG  
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020  
PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. Soerjadi Soedarsono  
Alamat kantor : Jl. Sentosa No. 56 Samarinda- Kalimantan Timur  
Nomor telepon : 0541 - 771290  
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Untung Haryono  
Alamat kantor : Jl. Sentosa No. 56 Samarinda –Kalimantan Timur  
Nomor telepon : 0541 - 771290  
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Perdana Karya Perkasa Tbk;
2. Laporan keuangan PT Perdana Karya Perkasa Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Perdana Karya Perkasa Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Perdana Karya Perkasa tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Perdana Karya Perkasa Tbk;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Samarinda, 21 Mei 2021

**Soerjadi Soedarsono**  
Direktur Utama

**Untung Haryono**  
Direktur

## **LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

No: 00199/2.0627/AU.1/02/0324-2/1/V/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan **PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk** tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### **Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajiban estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk** tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
HERMAN DODY TANUMIHARDJA & REKAN**



**Drs. Dedi Tanumihardja, CPA., CA**

Izin Akuntan Publik No. AP : 0324

Jakarta, 21 Mei 2021



**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan bank	3c,3h,5,32	346.861	1.093.848
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing- masing sebesar Rp 9.732.234,-.	3c,6,31,32	4.770.791	1.599.376
Piutang lain-lain	7	529.066	1.550.670
Persediaan - setelah dikurangi cadangan persediaan usang pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing- masing sebesar Rp 7.534.810,-.	3i,8,30,32	-	164.243
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	9	618.120	1.859.442
Uang muka	10	275.700	908.396
Pajak dibayar dimuka	28a	212.291	387.894
Jaminan pelaksanaan pekerjaan	11	-	737.700
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	3l,12,30,32	-	4.481.465
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>6.752.830</b>	<b>12.783.032</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 224.336.372 dan Rp 218.077.787,-.	3k,13,30,32	43.833.355	40.251.891
Aset pajak tangguhan	28c	18.069.539	18.620.636
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>61.902.894</b>	<b>58.872.527</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>68.655.724</b>	<b>71.655.559</b>



PT PERDANA KARYA PERKASA, Tbk.

Untung Haryono

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang bank	14	1.668.192	-
Biaya yang masih harus dibayar	16,32	80.283	86.287
Utang pajak	28b	2.319	1.190
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>1.750.794</b>	<b>87.477</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Utang pihak berelasi	3d,15,30,32	25.153.723	56.022.968
Liabilitas imbalan pasca kerja	3p,17,30,32	1.359.705	1.216.887
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>26.513.428</b>	<b>57.239.856</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham - nilai nominal Rp 200 per saham			
Modal dasar - 600.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor - 600.000.000 saham	18	120.000.000	120.000.000
Tambahan modal disetor	19	19.972.351	19.972.351
Modal saham diperoleh kembali	20	-	(26.009.555)
Penghasilan komprehensif lain		(2.697.103)	(2.725.021)
Saldo Laba			
Ditentukan penggunaannya	21	1.000.000	1.000.000
Tidak ditentukan penggunaannya		(97.883.745)	(97.909.548)
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>40.391.503</b>	<b>14.328.227</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>68.655.724</b>	<b>71.655.559</b>



PT. PERDANA KARYA PERKASA, Tbk.

Untung Haryono

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Usaha	22	17.334.744	13.253.947
Beban Pokok Penjualan	23	(12.694.359)	(8.374.143)
<b>LABA (RUGI) KOTOR</b>		<b>4.640.385</b>	<b>4.879.804</b>
Beban penjualan	24	(155.193)	(89.328)
Beban umum dan administrasi	25	(2.280.349)	(1.980.182)
Beban keuangan	26	(2.766.989)	(13.228.285)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	27	734.314	925.097
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>		<b>172.167</b>	<b>(9.492.894)</b>
Manfaat Pajak Bersih	28c	(146.364)	(31.996.274)
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>25.803</b>	<b>(41.489.168)</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>	17		
Keuntungan aktuarial dari program pensiun manfaat pasti		27.918	238.642
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>53.721</b>	<b>(41.250.526)</b>
Laba (Rugi) Bersih		53.721	(41.250.526)
<b>JUMLAH LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>53.721</b>	<b>(41.250.526)</b>
Laba (Rugi) per saham			
Laba (Rugi) bersih per saham dasar (Rupiah penuh)	29	0	(76)



PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk.

Untung Haryono

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*



**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal saham	Tambahannya modal disetor	Modal saham diperoleh kembali	Penghasilan komprehensif lain	Saldo Laba		Jumlah ekuitas
					Ditentukan penggunaannya	Tidak ditentukan penggunaannya	
<b>Saldo per 1 Januari 2019</b>	<b>120.000.000</b>	<b>19.972.351</b>	<b>(26.009.555)</b>	<b>(2.963.663)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>(56.420.380)</b>	<b>55.578.753</b>
Keuntungan Komprehensif tahun berjalan	-	-	-	238.642	-	(41.489.168)	(41.250.526)
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>120.000.000</b>	<b>19.972.351</b>	<b>(26.009.555)</b>	<b>(2.725.021)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>(97.909.548)</b>	<b>14.328.227</b>
Konversi utang ke modal	-	-	26.009.555	-	-	-	26.009.555
Keuntungan Komprehensif tahun berjalan	-	-	-	27.918	-	25.803	53.721
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>120.000.000</b>	<b>19.972.351</b>	<b>-</b>	<b>(2.697.103)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>(97.883.745)</b>	<b>40.391.503</b>

  
PT PERDANA KARYA PERKASA, Tbk.  
Untung Haryono

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan kas dari pelanggan	15.404.650	23.688.688
Pembayaran kas kepada :		
Pemasok dan beban lainnya	(7.842.262)	3.275.902
Direksi dan karyawan	(2.763.259)	1.015.569
<b>Kas dihasilkan dari operasi</b>	<b>4.799.129</b>	<b>27.980.159</b>
Pembayaran beban keuangan-net	(2.766.989)	(13.228.285)
Penerimaan pajak	411.013	(384.768)
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	2.443.153	14.367.107
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	-	-
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan utang bank	13.972.391	-
Pembayaran utang bank	(12.304.199)	-
Penerimaan (Pembayaran) utang pihak berelasi	(4.858.332)	(14.676.780)
<b>Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(3.190.140)</b>	<b>(14.676.780)</b>
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(746.987)</b>	<b>(309.673)</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>1.093.848</b>	<b>1.403.521</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>346.861</b>	<b>1.093.848</b>



PT. PERDANA KARYA PERKASA, Tbk.

Untung Haryono

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. INFORMASI UMUM**

**a. Pendirian dan Informasi Umum**

PT Perdana Karya Perkasa Tbk (Perusahaan) didirikan di Samarinda dengan nama PT Perdana Karya Kaltim berdasarkan Akta No.17 tanggal 7 Desember 1983, yang selanjutnya diubah dengan Akta No.4 tanggal 4 November 1985, keduanya dibuat oleh Laden Mering SH, Calon Notaris di Samarinda. Pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No.C.24475.HT.01.01.TH.1986 tanggal 24 Juni 1986, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.10611/2006, Tambahan Berita Negara No.79/2006 tanggal 3 Oktober 2006.

Sesuai pasal 3 anggaran dasar, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha di bidang-bidang pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, pertanian, pengangkutan darat, perbengkelan dan jasa-jasa melalui divisi-divisi usaha pertambangan batubara, konstruksi, dan persewaan peralatan berat. Perusahaan telah beroperasi komersial sejak 1983 dengan melaksanakan kegiatan usaha persewaan peralatan berat dan jasa yang terkait dengan konstruksi bangunan, dan selanjutnya sejak tahun 2005 juga beroperasi di bidang pertambangan batubara.

Perusahaan berdomisili di Graha Perdana, Jalan Sentosa 56 Samarinda, Kalimantan Timur.

Susunan pengurus perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
<b>Dewan Komisaris</b>		
Komisaris Utama	: Hendry Widyanto	Hendry Widyanto
Komisaris Independen	: Elwin Rachmat	Elwin Rachmat
<b>Direksi</b>		
Direktur Utama	: Soerjadi Soedarsono	Soerjadi Soedarsono
Direktur Independen	: Untung Haryono	Untung Haryono
<b>Komite Audit</b>		
Ketua/Komisaris Independen	: Elwin Rachmat	Elwin Rachmat
Anggota	: Sumarmo	Sumarmo
Anggota	: Dewi Kusumawati	Dewi Kusumawati

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebanyak 18 orang karyawan.

**b. Penawaran Umum Saham Perusahaan**

Perusahaan melaksanakan Penawaran Umum saham berdasarkan surat efektif dari Bapepam-LK No.S-3178/BL/2007 tanggal 27 Juni 2007 meliputi 125.000.000 saham (20,83%) saham biasa atas nama, harga nominal Rp 200 (dua ratus rupiah) setiap saham dengan harga Penawaran Umum sebesar Rp 400 (empat ratus rupiah) setiap saham. Saham-saham Perusahaan dicatat dan diperdagangkan pertama kali di Bursa Efek Indonesia di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2007.

**2. PERUBAHAN PADA PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRESTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)**

Kebijakan akuntansi yang diadopsi adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi keuangan tahun sebelumnya, kecuali bagi pengadopsian PSAK dan ISAK yang berlaku efektif pada atau setelah 1 Januari 2020. Perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan, dibuat sebagaimana diisyaratkan sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Standar baru, amandemen, penyesuaian dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 namun tidak berdampak secara substansial terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. PERUBAHAN PADA PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRESTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (Lanjutan)**

1 Januari 2020

- PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian ("KKE"), yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Perusahaan menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Perusahaan memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif.

Berdasarkan penilaian terhadap model bisnis dan arus kas kontraktual, pengaturan baru atas PSAK 71 untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan tidak berdampak terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan pada tanggal 1 Januari 2020.

- PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

PSAK No. 72 menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi),

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, Perusahaan memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif.

Kebijakan pengakuan pendapatan kontrak konstruksi, dimana Perusahaan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu, mengharuskan Perusahaan untuk memilih metode *input* atau *output* untuk mengukur kemajuan untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan. Penggunaan metode *output* untuk mengukur kemajuan pelaksanaan dapat menghasilkan margin yang berbeda dari waktu ke waktu, tidak seperti metode *input* yang berdasarkan pada biaya yang timbul pada saat terjadinya; namun, total margin pada kontrak akan menjadi sama di kedua metode tersebut. Biaya tidak dapat ditangguhkan hanya untuk menyesuaikan dengan pendapatan untuk menormalkan margin laba.

- PSAK No. 73, "Sewa"

PSAK 73 memperkenalkan model di mana liabilitas sewa, yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa, dan aset hak-guna yang terkait diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat dimulainya sewa. Dalam laporan laba rugi, penyusutan aset hak-guna dan bunga liabilitas sewa diakui sebagai beban, bukan sebagai pembayaran sewa garis lurus menurut standar akuntansi sebelumnya.

Sesuai dengan persyaratan transisi dalam PSAK 73, Perusahaan memilih untuk menerapkan secara retrospektif dengan efek kumulatif dari implementasi awal yang diakui pada 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif.

Perusahaan memilih untuk menggunakan cara praktis di mana jumlah aset hak-guna sama dengan liabilitas sewa sehingga tidak ada penyesuaian awal saldo laba, bersama dengan cara praktis berikut:

- untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dari komponen sewa berdasarkan kelas aset pendasar;
- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
- sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek;



**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. PERUBAHAN PADA PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRESTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (Lanjutan)**

- PSAK No. 73, "Sewa" (lanjutan)
  - pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal;
  - menggunakan peninjauan kembali dalam menentukan jangka waktu sewa di mana kontrak berisi opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri sewa;
  - mengandalkan penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sesuai PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" segera sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai.
- ISAK 36 "Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa".
- ISAK 25 "Hak atas tanah", dicabut dengan diterbitkannya PSAK 73 "Sewa" dan tidak akan efektif lagi sejak 1 Januari 2020. Interpretasi atas standar tersebut mengharuskan manajemen untuk melakukan penilaian apakah substansi suatu transaksi adalah merupakan transaksi pembelian aset atau sewa. ISAK 36 memberikan panduan lebih lanjut tentang bagaimana membedakan sewa dari pembelian atau penjualan ketika hak milik atas aset pendasar tidak dialihkan kepada *lessee* pembeli dan menekankan akuntansi untuk hak atas tanah tergantung pada substansi hak dan bukan hukumnya.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**

**a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)**

Laporan keuangan Perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

**b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali properti dan instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasi atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

**c. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing**

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam mata uang fungsional Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional berdasarkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 14.105 dan Rp 13.935 per 1 Dolar Amerika Serikat.

**d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Pihak - pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - I. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
  - II. memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau
  - III. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)**

- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- I. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).
  - II. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - III. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - IV. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas
  - V. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
  - VI. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
  - VII. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Tersedia untuk dijual
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

**e. Aset Keuangan**

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang Perusahaan disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi), misalnya direksi dan CEO

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan.

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**e. Aset Keuangan (Lanjutan)**

Dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Kelompok aset ini selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai (jika ada).

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa yang tidak mempunyai kuotasi harga pasar di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan setara kas, kecuali kas, piutang pelanggan dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Pinjaman yang diberikan dan piutang dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Pinjaman yang diberikan dan piutang diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**e. Aset Keuangan (Lanjutan)**

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan yang serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Kecuali instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai, sepanjang nilainya tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke pendapatan komprehensif lain.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

**f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas**

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Pembelian kembali instrumen ekuitas Perusahaan (saham treasury) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tersebut tidak diakui dalam laba rugi.



**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (lanjutan)**

Liabilitas Keuangan

Utang usaha dan utang lain-lain, serta pinjaman lainnya pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

**g. Saling hapus antar Aset keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara netto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**h. Kas dan Bank**

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

**i. Persediaan**

Perusahaan mengakui persediaan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan biaya penjualan.

Perusahaan menetapkan penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala pada setiap akhir periode pelaporan atas kondisi fisik dan nilai realisasi bersih persediaan.

**j. Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja**

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Perusahaan yang berasal dari pekerjaan kontrak yang dilakukan untuk pemberi kerja, namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi, ditambah laba yang diakui dikurangi dengan jumlah kerugian yang diakui dan penagihan termin.

**k. Aset Tetap**

Aset tetap diakui sebesar biaya perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan, dan penurunan nilai jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi biaya perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan. Setelah pengakuan, aset tetap diukur dengan menggunakan model biaya.

Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**k. Aset Tetap (lanjutan)**

	<u>Tahun</u>
Bangunan	20
Alat berat	8
Mesin dan peralatan	8
Kendaraan	4
Inventaris proyek	4
Inventaris kantor	4

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aset tetap untuk menjaga manfaat keekonomian masa yang akan datang dibebankan padalaporan laba rugi pada saat terjadinya. Penyempurnaan yang menambah nilai (kegunaan) dan masa manfaat, dan penambahan dalam jumlah yang signifikan dikapitalisasi.

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul diakui dalam laporan laba rugi pada tahun berjalan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

**l. Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual**

Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual (atau kelompok lepasan) diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan dari pada melalui pemakaian berlanjut. Kondisi ini dianggap memenuhi hanya ketika aset (atau kelompok lepasan) adalah berada dalam keadaan segera dapat dijual dengan syarat-syarat yang biasa dan umum diperlukan dalam penjualan aset (atau kelompok lepasan) tersebut dan penjualannya harus sangat mungkin terjadi dan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual (atau kelompok lepasan) harus tersedia untuk segera dijual.

Ketika Perusahaan berkomitmen terhadap rencana penjualan yang mengakibatkan kehilangan pengendalian atas entitas anak, seluruh aset dan liabilitas entitas anak tersebut diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual ketika kriteria yang dijelaskan di atas terpenuhi, terlepas pada apakah setelah penjualan tersebut Perusahaan masih memiliki kepentingan nonpengendali dalam entitas anak terdahulu atau tidak.

Ketika Perusahaan berkomitmen terhadap rencana penjualan yang melibatkan penjualan suatu investasi atau bagian dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama, investasi atau bagian dari investasi yang akan dijual diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual ketika kriteria yang dijelaskan di atas terpenuhi, dan Perusahaan menghentikan penggunaan metode ekuitas sehubungan dengan bagian investasi tersebut yang diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual.

Aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) diklasifikasi sebagai yang dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**m. Sewa**

**Sejak 1 Januari 2020**

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau diamandemen pada atau setelah 1 Januari 2020.

Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Kontrak dapat berisi komponen sewa dan nonsewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri. Perusahaan memilih untuk tidak memisahkan komponen sewa dan non-sewa dan sebagai gantinya memperhitungkannya sebagai komponen sewa tunggal.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan sewa hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari awal masa sewa hingga akhir umur manfaat aset pendasar

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada awal sewa. Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa. Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto

Setelah awal masa sewa, setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Utang sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi.

Beberapa sewa berisi ketentuan pembayaran variabel dihitung berdasarkan volume. Pembayaran sewa variabel tersebut tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa.

**Sebelum 1 Januari 2020**

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

**Sebagai Lessor**

Dalam sewa pembiayaan, *lessor* mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah investasi sewa neto Perusahaan. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih *lessor*.

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**m. Sewa (lanjutan)**

Sebagai Lessee

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Perusahaan yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

**n. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset nonkeuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

**o. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

**Sejak 1 Januari 2020**

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi cara sebagai berikut

1. Pada suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
2. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan).



**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**o. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)**

**Sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)**

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Utang lain-lain"

Perusahaan mengalihkan pengendalian atas barang atau jasa sepanjang waktu, jika satu dari kriteria berikut terpenuhi:

- Pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan Perusahaan selama Perusahaan melaksanakan kewajiban pelaksanaannya;
- kegiatan Perusahaan menimbulkan atau meningkatkan aset (sebagai contoh, pekerjaan dalam proses) yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan; atau
- pelaksanaan Perusahaan tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif dan Perusahaan memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas kinerja yang telah diselesaikan sampai saat ini.

Perusahaan menerapkan metode output untuk mengukur kemajuan entitas. Perusahaan mengecualikan dari pengukuran kemajuan setiap barang atau jasa dimana Perusahaan tidak mengalihkan pengendalian kepada pelanggan.

Perusahaan mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu hanya jika entitas dapat mengukur kemajuan secara wajar terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan. Dalam beberapa keadaan, Perusahaan mungkin tidak dapat mengukur hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar, tetapi Perusahaan memperkirakan untuk memulihkan biaya yang terjadi dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan. Dalam keadaan tersebut, Perusahaan mengakui pendapatan hanya sejumlah biaya yang terjadi sampai waktu tertentu di mana Perusahaan dapat mengukur hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar.

**Sebelum 1 Januari 2020**

Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan dikurangi dengan estimasi, retur, potongan harga dan diskon serta cadangan lain yang serupa. Kriteria pengakuan tertentu berikut harus dipenuhi sebelum pengakuan pendapatan diakui:

**Pendapatan jasa konstruksi dan jasa *land clearing***

Perusahaan mengakui pendapatan dari jasa konstruksi dan jasa *land clearing* dengan metode persentase penyelesaian. Jumlah pendapatan tahun berjalan diakui berdasarkan perbandingan antara jumlah biaya yang terjadi dengan total taksiran biaya proyek. Biaya yang terjadi, meliputi biaya material, tenaga kerja, dan biaya proyek tidak langsung lainnya, diakumulasi ke dalam akun 'Pekerjaan Dalam Pelaksanaan'.

**Pendapatan bunga**

Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

**p. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja**

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetapnya. Perusahaan juga membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Perusahaan menghitung selisih antara imbalan yang diterima karyawan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan manfaat yang diterima dari program pensiun untuk pensiun normal.

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**p. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)**

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode projected unit credit dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba [Catatan: jika entitas memilih untuk menyajikannya sebagai pos terpisah pada ekuitas, disesuaikan dengan penyajian Laporan Perubahan Ekuitas dan gunakan: sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas] dan tidak akan direklas ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga netto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti netto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga netto
- Pengukuran kembali

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Perusahaan. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan ke program.

Liabilitas untuk pesangon diakui pada lebih awal ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

**q. Pajak Penghasilan**

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**q. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Untuk tujuan pengukuran liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan untuk properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar, nilai tercatat properti tersebut dianggap dipulihkan seluruhnya melalui penjualan, kecuali praduga tersebut dibantah. Praduga tersebut dibantah ketika properti investasi dapat disusutkan dan dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk mengonsumsi secara substansial seluruh manfaat ekonomi atas investasi properti dari waktu ke waktu, bukan melalui penjualan. Direksi Perusahaan mereviu portofolio properti investasi Perusahaan dan menyimpulkan bahwa tidak ada properti investasi Perusahaan yang dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk mengonsumsi secara substansial seluruh manfaat ekonomi atas investasi properti dari waktu ke waktu, bukan melalui penjualan. Oleh karena itu, direksi telah menentukan bahwa praduga penjualan yang ditetapkan dalam amandemen PSAK 46 tidak dibantah. Akibatnya, Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan atas perubahan nilai wajar properti investasi karena Perusahaan tidak dikenakan pajak penghasilan atas perubahan nilai wajar properti investasi.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

**r. Laba (rugi) per Saham**

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba (rugi) per saham dilusian dihitung dengan membagi laba rugi bersih yang diatribusikan kepada Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

**s. Informasi Segmen**

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara reguler direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

**4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, Direksi diwajibkan untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang perkiraan tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode saat ini dan masa depan.

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen tidak membuat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, selain dari estimasi yang diatur di bawah ini.

**Sumber Estimasi Ketidakpastian**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Masa Manfaat Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 8 tahun, suatu kisaran yang umumnya diperkirakan dalam industri sejenis. Perubahan dalam pola pemakaian dan tingkat perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis serta nilai sisa aset dan karenanya biaya penyusutan masa depan memiliki kemungkinan untuk diubah/direvisi. Jumlah tercatat aset tetap Perusahaan pada tanggal laporan keuangan diungkapkan di dalam Catatan 13 laporan keuangan.

Penurunan Nilai Piutang Usaha

Penurunan piutang usaha terjadi jika terdapat bukti objektif bahwa Perusahaan tidak dapat menagih seluruh atau sebagian nilai piutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Penilaian dilakukan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai atau apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang sebelumnya diakui pada tahun-tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Ketika hasil aktual berbeda dari jumlah yang awalnya dinilai, perbedaan tersebut akan mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat piutang usaha dalam laporan keuangan tahun berikutnya.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Ketika hasil pajak yang dikeluarkan berbeda dengan jumlah yang awalnya diakui, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan penyisihan pajak tangguhan pada periode di mana penentuan tersebut dilakukan.

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum dikompensasi sejauh besar kemungkinan bahwa laba fiskal akan tersedia untuk dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Penentuan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui berdasarkan perbedaan waktu dan laba fiskal di masa mendatang bersama-sama dengan strategi perencanaan pajak masa depan membutuhkan pertimbangan signifikan dari manajemen.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Penentuan liabilitas imbalan pasca kerja dan beban imbalan pascakerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)**

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

Hasil aktual yang berbeda dengan jumlah yang diestimasi diperlakukan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam catatan 3 atas laporan keuangan. Sementara manajemen Perusahaan berpendapat bahwa asumsi yang digunakan adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dari hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan secara material dapat mempengaruhi perkiraan jumlah liabilitas atas imbalan pascakerja dan beban imbalan pascakerja. Jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang Perusahaan diungkapkan pada Catatan 18 laporan keuangan.

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5. KAS DAN BANK**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Kas	232.966	52.818
Bank :		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	57.790	273.148
PT Bank BPD Kaltim	25.523	25.523
PT Bank Bukopin	13.890	13.954
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.712	714.559
Sub-jumlah	99.915	1.027.183
US Dollar		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13.980	13.846
<b>Jumlah</b>	<b>346.861</b>	<b>1.093.848</b>

**6. PIUTANG USAHA**

Akun ini merupakan piutang usaha kepada pihak ketiga sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Berdasarkan pelanggan		
- Piutang usaha batubara		
Rupiah:		
PT Indomineral Mega Perkasa	875.000	875.000
PT Sarana Marine Perkasa	512.207	512.207
CV Merry Jaya	249.159	249.159
Sub-jumlah	1.636.366	1.636.366
US Dollar:		
PT Windu Kencana Adisakti	1.518.987	1.497.018
PT Sarana Marine Perkasa	558.320	550.245
Sub-jumlah	2.077.307	2.047.263
<b>Sub-Jumlah</b>	<b>3.713.672</b>	<b>3.683.629</b>
- Piutang usaha jasa konstruksi dan <i>land clearing</i>		
Rupiah:		
PT Pertamina Tbk	3.055.410	-
PT Meindo Elang Indah	133.800	133.800
PT Nestor	40.425	40.425
PT Semberani Persada Oil	16.614	16.614
Sub-jumlah	3.246.249	190.839
US Dollar:		
Salamander Energy Ltd	4.589.766	4.523.386
PT Bima Nusa International	728.165	717.634
PT Semberani Persada Oil	625.797	616.746
Sub-jumlah	5.943.728	5.857.766
<b>Sub-Jumlah</b>	<b>9.189.977</b>	<b>6.048.605</b>
Piutang usaha sewa peralatan berat		
Rupiah:		
PT BKPL	1.599.375	1.599.375
<b>Jumlah Piutang Usaha Kepada Pihak Ketiga</b>	<b>14.503.025</b>	<b>11.331.609</b>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(9.732.234)	(9.732.234)
<b>Jumlah Piutang Usaha Bersih</b>	<b>4.770.791</b>	<b>1.599.376</b>

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**6. PIUTANG USAHA (Lanjutan)**

	2020	2019
Berdasarkan umur :		
1 - 30 hari	3.055.410	-
Lebih dari 180 hari	11.447.615	11.331.609
<b>Jumlah</b>	<b>14.503.025</b>	<b>11.331.609</b>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(9.732.234)	(9.732.234)
<b>Jumlah piutang usaha - bersih</b>	<b>4.770.791</b>	<b>1.599.376</b>

Berdasarkan penelaahan pada akhir periode pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan piutang telah memadai untuk menutup kerugian yang timbul dari kegagalan penagihan piutang.

Sebagian piutang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank (Catatan No.14)

**7. PIUTANG LAIN-LAIN**

Akun ini merupakan piutang kepada pihak ketiga sebagai berikut:

	2020	2019
Piutang Karyawan	529.066	-
Direksi	-	1.550.670
<b>Jumlah</b>	<b>529.066</b>	<b>1.550.670</b>

Berdasarkan penelaahan pada akhir periode pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang lain-lain dapat ditagih.

**8. PERSEDIAAN**

Akun ini tersiri dari:

	2020	2019
Material konstruksi dan suku cadang	7.534.810	7.534.810
BBM dan pelumas	-	164.243
<b>Jumlah</b>	<b>7.534.810</b>	<b>7.699.054</b>
Pencadangan persediaan usang	(7.534.810)	(7.534.810)
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>164.243</b>

**9. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA**

Akun ini merupakan tagihan berdasarkan jenis pekerjaan sebagai berikut :

	2020	2019
PT Pertamina Tbk	618.120	-
Santos Pty Ltd	-	1.859.442
<b>Jumlah</b>	<b>618.120</b>	<b>1.859.442</b>

**10. UANG MUKA**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 akun ini merupakan uang muka pekerjaan masing-masing sebesar Rp 275.700 dan Rp 908.396,-.



**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**11. JAMINAN PELAKSANA PEKERJAAN**

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Fabrication and Instalation Call Out Services #904242	-	433.411
Call Out Fabrication and Construction Services #904118	-	304.289
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>737.700</b>

Jaminan pelaksanaan pekerjaan merupakan uang jaminan penerbitan bank garansi untuk jaminan pelaksanaan (performance bond) pekerjaan konstruksi berdasarkan ketentuan kontrak masing-masing pekerjaan.

**12. ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL**

Manajemen Perusahaan memutuskan untuk menjual aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi sebagai berikut:

	2020		
	Alat berat	Kendaraan	Jumlah
<u>Biaya perolehan</u>			
Saldo 1 Januari 2020	9.840.049	-	9.840.049
Saldo 31 Desember 2020	-	-	-
<u>Akumulasi penyusutan</u>			
Saldo 1 Januari 2020	5.358.584	-	5.358.584
Saldo 31 Desember 2020	-	-	-
<b>Jumlah tercatat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2019		
	Alat berat	Kendaraan	Jumlah
<u>Biaya perolehan</u>			
Saldo 1 Januari 2019	9.840.049	-	9.840.049
Saldo 31 Desember 2019	9.840.049	-	9.840.049
<u>Akumulasi penyusutan</u>			
Saldo 1 Januari 2019	5.358.584	-	5.358.584
Saldo 31 Desember 2019	5.358.584	-	5.358.584
<b>Jumlah tercatat</b>	<b>4.481.465</b>	<b>-</b>	<b>4.481.465</b>

Aset tetap yang diputuskan untuk dijual umumnya merupakan jenis barang yang spesifik dan dengan pembeli yang spesifik pula, sehingga sejak diputuskan untuk dijual sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan belum berhasil menjual dan umurnya sudah melebihi dua tahun sehingga dicatat kembali sebagai aktiva produktif dan disusutkan pada tahun 2021.

**13. ASET TETAP**

Akun ini terdiri dari:

	2020			
	Saldo awal	Mutasi		Saldo akhir
	1 Januari 2020	Penambahan	Reklasifikasi	31 Desember 2020
<b>Biaya perolehan:</b>				
Tanah	22.476.891	-	-	22.476.891
Bangunan	21.810.109	-	-	21.810.109
Alat berat	168.388.508	-	9.840.049	178.228.557
Mesin dan peralatan	19.039.142	-	-	19.039.142
Kendaraan	24.510.089	-	-	24.510.089
Inventaris proyek	863.092	-	-	863.092
Inventaris kantor	1.241.847	-	-	1.241.847
<b>Jumlah</b>	<b>258.329.678</b>	<b>-</b>	<b>9.840.049</b>	<b>268.169.727</b>

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**13. ASET TETAP (Lanjutan)**

	<b>2020</b>			
	Saldo awal	Mutasi		Saldo akhir
	1 Januari 2020	Penambahan	Reklasifikasi	31 Desember 2020
Akumulasi penyusutan:				
Bangunan	4.035.108	900.000	-	4.935.108
Alat berat	168.388.509	-	5.358.585	173.747.094
Mesin dan peralatan	19.039.142	-	-	19.039.142
kendaraan	24.510.089	-	-	24.510.089
Inventaris proyek	863.092	-	-	863.092
Inventaris kantor	1.241.847	-	-	1.241.847
<b>Jumlah</b>	<b>218.077.787</b>	<b>900.000</b>	<b>5.358.585</b>	<b>224.336.372</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>40.251.891</b>			<b>43.833.355</b>

	<b>2020</b>			
	Saldo awal	Mutasi		Saldo akhir
	1 Januari 2019	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2019
Biaya perolehan:				
Tanah	10.476.891	12.000.000	-	22.476.891
Bangunan	3.810.109	18.000.000	-	21.810.109
Alat berat	168.388.508	-	-	168.388.508
Mesin dan peralatan	19.039.142	-	-	19.039.142
Kendaraan	24.510.089	-	-	24.510.089
Inventaris proyek	863.092	-	-	863.092
Inventaris kantor	1.241.847	-	-	1.241.847
Aset dalam pelaksanaan	30.000.000	-	30.000.000	-
Kendaraan	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>258.329.678</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>258.329.678</b>
Akumulasi penyusutan:				
Bangunan	3.810.108	225.000	-	4.035.108
Alat berat	168.388.509	-	-	168.388.509
Mesin dan peralatan	19.039.142	-	-	19.039.142
kendaraan	24.510.089	-	-	24.510.089
Inventaris proyek	863.092	-	-	863.092
Inventaris kantor	1.241.847	-	-	1.241.847
<b>Jumlah</b>	<b>217.852.787</b>	<b>225.000</b>	<b>-</b>	<b>218.077.787</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>40.476.891</b>			<b>40.251.891</b>

Pada 31 Desember 2020 dan 2019 beban penyusutan aset tetap dialokasikan pada beban pokok penjualan masing-masing sebesar Rp 900.000 dan Rp 225.000,-.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi aset tetap cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi. Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap pada akhir periode pelaporan.

Penambahan biaya perolehan dan beban akumulasi alat berat merupakan reklasifikasi dari aset tetap untuk dijual yang umurnya sudah melebihi dari dua tahun

Sebagian aset tetap digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank (Catatan No.14)

**14. UTANG BANK**

Akun ini terdiri dari:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.668.192	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.668.192</b>	<b>-</b>

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**14. UTANG BANK (Lanjutan)**

**PT Bank Rakyat Indonesia Tbk**

Berdasarkan Akta No. 28 tanggal 30 Juli 2020, mengenai Addendum Persetujuan Membuka Kredit, PT Perdana Karya Perkasa Tbk memperoleh pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan ketentuan sebagai berikut:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| a) Jenis Pinjaman | : Bank Garasi   |
| Plafond Pinjaman  | : Rp 1.000.000.000,-.   |
| Jangka Waktu      | : 12 bulan, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2020 - 30 Juli 2021.                        |
| Tujuan            | : - Jaminan tender ( <i>Bid Bond</i> )<br>- Tambahan modal kerja atas pembiayaan proyek |
| b) Jenis Pinjaman | : Kredit Modal Kerja Konstruksi Plafon W/A  |
| Plafond Pinjaman  | : Rp 7.500.000.000,-.   |
| Jangka Waktu      | : 12 bulan, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2020 - 30 Juli 2021.                        |
| Tujuan            | : - Jaminan tender ( <i>Bid Bond</i> )<br>- Tambahan modal kerja atas pembiayaan proyek |
| Bunga             | : 12% per tahun   |

Atas utang tersebut PT Perdana Karya Perkasa Tbk memberikan Jaminan berupa;

- Piutang proyek No.904242 sebesar Rp 2.902.983.000,-.
- Piutang proyek No. SP-002/V/20500/2020-SO sebesar Rp 4.286.213.000,-.
- Tanah dengan SHM No.7530 Seluas 233 m<sup>2</sup> di Kalimantan Timur.

**15. UTANG PIHAK BERELASI**

Berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Dana tanggal 5 April 2017, PT Royal Victoria Hotel (RVH) memberikan pinjaman kepada Perusahaan sebesar Rp 84.753.991.059. Dana Pinjaman tersebut untuk keperluan pelunasan pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 25.340.363 dan Rp 56.022.968,-.

Penyelesaian sebagian utang Perseroan kepada PT Royal Victoria Hotel senilai Rp 26.010.913.500 dilakukan melalui konversi seluruh saham treasury Perseroan sejumlah 60.631.500 lembar saham pada harga Rp 429 per saham. Transaksi ini telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 31 Agustus 2020.

**Persyaratan**

**a. Persetujuan RUPS**

- (i) Sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perusahaan, maka Surat Perjanjian Pinjaman Dana Ini harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu.
- (ii) Dalam kaitan transaksi pinjaman dana merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud Peraturan Bapepam No. IX.E.2 dan juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud Peraturan Bapepam No. IX.E.1 maka efektifnya peminjaman dana adalah setelah terpenuhinya semua ketentuan peraturan tersebut, tapi tidak terbatas pada pelaksanaan penilaian atas kewajaran transaksi oleh Penilai Independen yang ditunjuk.

**b. Perhitungan Bunga**

Para pihak bersepakat mengenai perhitungan bunga pinjaman sebesar 10,00% per tahun akan dibayarkan Perusahaan kepada RVH setiap bulan, kecuali selama *grace period* 1 (satu) tahun seperti yang dijelaskan.

**c. Jangka Waktu**

- (i) Jangka waktu pinjaman dana RVH kepada Perusahaan paling lama 9 (sembilan) tahun, terhitung sejak pinjaman dana berlaku efektif.
- (ii) RVH memberikan *grace period* kepada Perusahaan untuk melakukan pembayaran bunga saja setiap bulan sebesar Rp 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun.
- (iii) Pembayaran angsuran pokok beserta bunga dimulai tahun ke-2 (dua) sampai paling lama tahun ke-9 (sembilan).
- (iv) Dalam hal di kemudian hari disepakati penyelesaian pinjaman dana melalui cara lain selain pembayaran kembali dana pinjaman Perusahaan kepada RVH, di antaranya melalui konversi pinjaman menjadi peningkatan penyertaan modal Perusahaan kepada RVH, sepanjang memenuhi segenap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, maka kesepakatan tersebut harus dibuat sebelum jangka waktu pinjaman berakhir.

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**15. UTANG PIHAK BERELASI (Lanjutan)**

d. Jaminan Pinjaman

- (1) 14 SHGB dari tanah dan bangunan kantor di Jl. Sentosa no. 56 Samarinda.
- (2) 1 SHGB dari ruko kompleks Ruko Roxymas C4 no.5 Jakarta

Selama masa pinjaman, kedua aset tersebut bisa tetap digunakan oleh Perusahaan.

**16. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

Akun ini merupakan biaya operasional rutin Perusahaan. Saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 860.283 dan Rp 86.287,-.

**17. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA**

Perusahaan menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan No. 13/2003 Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut adalah 18 orang karyawan masing-masing untuk 31 Desember 2020 dan 2019.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Diakui pada laba rugi		
Biaya jasa kini	170.736	169.516
Biaya bunga	97.716	103.267
<b>Jumlah</b>	<b>268.452</b>	<b>272.783</b>
Diakui pada penghasilan komprehensif lain		
pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti neto		
keutungan (kerugian) aktuarial	(97.716)	(103.267)
<b>Jumlah yang diakui dilaporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain</b>	<b>170.736</b>	<b>169.516</b>

31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan menghitung sendiri, imbalan pasca kerja, imbalan pasti untuk karyawan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi yang sama sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Tingkat mortalita	TMI III	TMI III
Tingkat diskonto	8,03%	8,03%
Tingkat kenaikan gaji tahunan	8,00%	8,00%
Umur pensiun	55 tahun	55 tahun

Liabilitas imbalan paska kerja di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	-	-

Analisa atas mutasi saldo liabilitas diestimasi untuk imbalan kerja karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Saldo awal periode	1.216.887	1.286.013
Beban imbalan pasca kerja	170.736	169.516
Pendapatan komprehensif lain	(125.634)	(341.909)
Kerugian komprehensif lain	97.716	103.266
<b>Saldo akhir periode</b>	<b>1.359.705</b>	<b>1.216.887</b>

1.359.705

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**18. MODAL SAHAM**

	<b>31 Desember 2020</b>		
	Jumlah Saham	Presentase Kepemilikan	Jumlah Modal Disetor
Pemegang Saham :			
Soerjadi Soedarsono	215.710.148	35,95%	43.142.030
Fanny Listiawati	81.673.614	13,61%	16.334.723
PT Royal Victoria Hotel	60.631.500	10,11%	12.126.300
Publik (kepemilikan < 5%)	241.984.738	40,33%	48.396.948
<b>Jumlah</b>	<b>600.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000.000</b>
<b>31 Desember 2019</b>			
	Jumlah Saham	Presentase Kepemilikan	Jumlah Modal Disetor
Pemegang Saham :			
Soerjadi Soedarsono	215.710.148	35,95%	43.142.030
Fanny Listiawati	81.673.614	13,61%	16.334.723
Publik (kepemilikan < 5%)	241.984.738	40,33%	48.396.948
<b>Sub-jumlah</b>	<b>539.368.500</b>	<b>89,89%</b>	<b>107.873.700</b>
Perusahaan (treasury stocks)	60.631.500	10,11%	12.126.300
<b>Jumlah</b>	<b>600.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000.000</b>

**19. TAMBAHAN MODAL DISETOR**

Berdasarkan surat efektif dari Bapepam LK No.S-3178/BL/2007 tanggal 27 Juni 2007 terhadap Pernyataan Pendaftaran Perusahaan, Perusahaan melaksanakan Penawaran Umum Saham biasa atas nama sebanyak 125.000.000 saham, nilai nominal Rp 200 setiap saham, dengan harga Penawaran Umum sebesar Rp 400 setiap saham, atau Perusahaan memperoleh agio sebesar Rp 25.000.000.000. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-6/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 biaya pelaksanaan Penawaran Umum sebesar Rp 5.027.648.646 dicatat sebagai pengurang agio saham yang diperoleh tersebut di atas. Tambahan modal disetor (agio saham) setelah dikurangi biaya pelaksanaan Penawaran Umum di atas Rp 19.972.351.354,-.

**20. MODAL SAHAM DIPEROLEH KEMBALI**

Perusahaan melaksanakan pembelian kembali saham berdasarkan Peraturan Bapepam No.XI.B.3, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam LK No.Kep-405/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Pembelian Kembali Saham Emiten Atau Perusahaan Tercatat Dalam Kondisi Pasar Berpotensi Krisis. Saham-saham yang dibeli kembali dicatat berdasarkan biaya perolehan dan jumlah Modal Saham Diperoleh Kembali berjumlah 60.631.500 saham dengan biaya perolehan sebesar Rp 26.009.555.000,-.

Berdasarkan akta No.29,tanggal 31 Agustus 2020, oleh Notaris Rini Yulianti SH,di Jakarta mengenai modal saham .diperoleh kembali tersebut dikonversi dengan utang pihak berelasi - PT Royal Victoria Hotel sebesar 60.631.500 lembar saham dengan harga Rp 429 per lembar saham atau Rp 26.010.913.500. Penyertaan PT Royal Victoria Hotel dicatat sesuai harga perolehan adalah Rp 200 per lembar saham atau sebesar Rp 12.126.300.000,-.

**21. SALDO LABA SUDAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 akun ini merupakan cadangan umum yang disisihkan dari laba bersih masing-masing sebesar Rp 1.000.000,-.

**22. PENDAPATAN USAHA**

Akun ini merupakan pendapatan atas jasa konstruksi dan *land clearing* per 31 Desember 2020 dan 2019 dengan penjualan meliputi 5% atau lebih dari pendapatan Perusahaan pada periode berjalan sebagai berikut :

			<b>Persentase dari Jumlah Pendapatan</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Santos Pty Ltd	2.810.454	13.253.947	16%	100%
PT Pertamina (Persero) Tbk	14.524.290	-	84%	-
<b>Jumlah</b>	<b>17.334.744</b>	<b>13.253.947</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**23. BEBAN POKOK PENDAPATAN USAHA**

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Beban langsung		
Material	4.387.259	2.959.601
Tenaga kerja	1.679.251	1.846.439
Beban tidak langsung		
Sewa dan jasa lainnya	4.431.075	2.696.494
Penyusutan	900.000	225.000
Tunjangan dan kesejahteraan	448.803	7.825
HSES	104.927	166.438
BBM dan Pelumas	80.322	154.501
Pemeliharaan	15.615	1.747
Angkutan (mobilisasi)	8.000	47.487
Pengobatan	6.881	4.933
Lain-lain	632.227	263.679
<b>Jumlah</b>	<b>12.694.359</b>	<b>8.374.143</b>

**24. BEBAN PENJUALAN**

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Analisa & test lab	146.743	55.225
Administrasi tender	8.450	34.103
<b>Jumlah</b>	<b>155.193</b>	<b>89.328</b>

**25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Karyawan	1.084.008	1.060.137
Jasa Profesional	347.713	330.190
Imbalan pasca kerja	268.453	272.783
Perijinan dan pajak	238.757	136.647
Asuransi	125.807	20.565
Keperluan kantor	30.528	59.394
Pos dan telekomunikasi	29.748	20.879
Listrik dan air	4.084	852
Kendaraan dan transportasi	870	219
Pemeliharaan	-	3.310
Lain lain	150.383	75.205
<b>Jumlah</b>	<b>2.280.349</b>	<b>1.980.182</b>

**26. BEBAN KEUANGAN**

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Bunga pinjaman pihak berelasi	(1.633.467)	-
Bunga pinjaman bank	(713.654)	-
Beban lain-lain	(234.379)	-
Administrasi bank	(121.825)	(7.171)
Pengalihansaham treasuri untuk konversi utang	(63.664)	-
Pencadangan piutang tak tertagih	-	(3.302.318)
Pencadangan persediaan usang	-	(7.534.810)
Penghapusan tagihan bruto	-	(1.924.382)
Rugi Selisih Kurs	-	(329.823)
Bunga pinjaman lainnya	-	(129.780)
<b>Jumlah</b>	<b>(2.766.989)</b>	<b>(13.228.285)</b>

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**27. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN LAIN-LAIN - BERSIH**

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Pendapatan diluar usaha lainnya	606.667	915.000
Pendapatan bunga dan jasa giro	116.005	10.097
Pendapatan selisih kurs	11.642	-
<b>Jumlah</b>	<b>734.314</b>	<b>925.097</b>

**28. PERPAJAKAN**

Akun ini terdiri dari:

a. Pajak Dibayar Dimuka

	2020	2019
Pajak Pertambahan Nilai	161.988	277.107
PPh pasal 23	50.303	110.786
<b>Jumlah</b>	<b>212.291</b>	<b>387.894</b>

b. Utang Pajak

	2020	2019
PPh pasal 21	613	613
PPh pasal 23	1.706	576
<b>Jumlah</b>	<b>2.319</b>	<b>1.190</b>

c. Pajak penghasilan

	2020	2019
Manfaat pajak adalah sebagai berikut:		
Tangguhan	(551.097)	1.510.934
Pajak Final	404.733	68.000
Koreksi pajak tangguhan kadaluarsa	-	(33.575.208)
<b>Jumlah beban pajak</b>	<b>(146.364)</b>	<b>(31.996.274)</b>

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Rugi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	172.167	(9.492.894)
Perbedaan temporer:		
Beban yang tidak dapat dikurangi	3.642.596	(612.000)
Beban imbalan pasca kerja	268.453	272.783
Pendapatan jasa giro	(11.642)	(10.097)
Pendapatan jasa konstruksi	(4.047.331)	(68.000)
	24.243	(9.910.208)
Akumulasi rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya	(204.933.918)	(195.023.710)
<b>Akumulasi rugi fiskal akhir periode</b>	<b>(204.909.675)</b>	<b>(204.933.918)</b>



**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**28. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

c. Pajak penghasilan (lanjutan)

	2020	2019
<u>Pajak perseroan</u>		
Kini		
Pajak tangguhan	(551.097)	1.510.934
Pajak final	404.733	68.000
Koreksi pajak tangguhan kadaluarsa	-	(33.575.208)
<b>Jumlah manfaat pajak</b>	<b>(146.364)</b>	<b>(31.996.274)</b>

Rincian aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2020	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2020
Piutang usaha	2.273.700	-	-	2.273.700
Persediaan	618.210	(618.210)	-	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	338.065	67.113	-	405.178
Koreksi pajak tangguhan kadaluarsa	(33.575.208)	-	-	(33.575.208)
Akumulasi rugi fiskal	48.965.869	-	-	48.965.869
<b>Jumlah</b>	<b>18.620.636</b>	<b>(551.097)</b>	<b>-</b>	<b>18.069.539</b>

	1 Januari 2019	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2019
Piutang usaha	1.607.479	666.221	-	2.273.700
Persediaan	-	618.210	-	618.210
Liabilitas imbalan pasca kerja	321.503	16.562	-	338.065
Koreksi pajak tangguhan kadaluarsa	-	-	33.575.208	(33.575.208)
Akumulasi rugi fiskal	48.755.928	209.941	-	48.965.869
<b>Jumlah</b>	<b>50.684.910</b>	<b>1.510.934</b>	<b>33.575.208</b>	<b>18.620.636</b>

**29. LABA RUGI PER SAHAM DASAR**

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan rugi per saham dasar.

	2020	2019
Laba (rugi) bersih	53.721	(41.250.526)
Jumlah saham beredar	600.000	539.369
Rugi bersih per saham dasar (Rupiah penuh)	0	(76)

**30. INFORMASI SEGMENT**

Untuk tujuan pelaporan, manajemen Perusahaan mengklasifikasikan kegiatan usahanya sebagai bentuk primer pelaporan segmen, terdiri dari usaha pertambangan batubara, usaha jasa konstruksi *land clearing*, dan usaha sewa alat berat. Sedangkan untuk pelaporan segmen sekunder, Perusahaan tidak mengklasifikasikan kegiatan usahanya berdasarkan wilayah geografis, karena di antara wilayah-wilayah ekonomi di mana kegiatan usaha Perusahaan dilaksanakan tidak mempunyai risiko dan imbalan yang berbeda secara signifikan. Pelaporan segmen usaha Perusahaan adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2020		
<u>Aset segmen</u>	Pertambangan batubara	Jasa Konstruksi & Land clearing	Penyewaan alat berat
Piutang usaha	3.713.672	9.189.977	1.599.375
Tagihan bruto pemberi kerja	-	618.120	-
Aset tetap	-	43.833.355	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.713.672</b>	<b>53.641.452</b>	<b>1.599.375</b>
Aset tidak dapat dialokasikan			9.701.224
<b>Jumlah aset</b>			<b>68.655.724</b>

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**30. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)**

<b>31 Desember 2020</b>				
<u>Liabilitas segmen</u>	Pertambangan batubara	Jasa Konstruksi & Land clearing	Penyewaan alat berat	Jumlah
Utang berelasi	-	25.153.723	-	25.153.723
Biaya yang masih harus dibayar	-	80.283	-	80.283
<b>Jumlah</b>	-	<b>25.234.006</b>	-	<b>25.234.006</b>
Liabilitas tidak dapat dialokasikan				(43.421.717)
<b>Jumlah liabilitas</b>				<b>(18.187.711)</b>

  

<b>31 Desember 2020</b>				
<u>Hasil usaha segmen</u>	Pertambangan batubara	Jasa Konstruksi & Land clearing	Penyewaan alat berat	Jumlah
Pendapatan usaha :				
Pihak ketiga	-	17.334.744	-	17.334.744
Beban pokok pendapatan	-	12.694.359	-	12.694.359
<b>Rugi kotor</b>	-	<b>4.640.385</b>	-	<b>4.640.385</b>
Beban penjualan				155.193
Beban umum dan administrasi				2.280.349
Beban keuangan				2.766.989
Keuntungan (kerugian) lain-lain - bersih				(734.314)
Laba sebelum pajak				172.167
Manfaat pajak penghasilan				(146.364)
Laba bersih				25.803
Laba komprehensif tahun berjalan				25.803
Laba bersih				25.803
<b>Jumlah</b>				<b>25.803</b>

  

<b>31 Desember 2019</b>				
<u>Aset segmen</u>	Pertambangan batubara	Jasa Konstruksi & Land clearing	Penyewaan alat berat	Jumlah
Piutang usaha	3.769.048	5.963.187	1.599.375	11.331.609
Tagihan bruto pemberi kerja	-	1.859.442	-	1.859.442
Aset tetap untuk dijual	-	4.481.465	-	4.481.465
Aset tetap	-	40.476.891	-	40.476.891
Jaminan pelaksanaan pekerjaan	-	737.700	-	737.700
<b>Jumlah</b>	<b>3.769.048</b>	<b>53.518.684</b>	<b>1.599.375</b>	<b>58.887.106</b>
Aset tidak dapat dialokasikan				12.768.453
<b>Jumlah aset</b>				<b>71.655.559</b>

  

<b>31 Desember 2019</b>				
<u>Liabilitas segmen</u>	Pertambangan batubara	Jasa Konstruksi & Land clearing	Penyewaan alat berat	Jumlah
Utang berelasi	-	56.022.968	-	56.022.968
Biaya yang masih harus dibayar	-	86.287	-	86.287
<b>Jumlah</b>	-	<b>56.109.255</b>	-	<b>56.109.255</b>
Liabilitas tidak dapat dialokasikan				15.546.304
<b>Jumlah liabilitas</b>				<b>71.655.559</b>

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**30. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)**

Hasil usaha segmen	31 Desember 2019			Jumlah
	Pertambangan batubara	Jasa Konstruksi & Land clearing	Penyewaan alat berat	
Pendapatan usaha :				
Pihak ketiga	-	13.253.947	-	13.253.947
Beban pokok pendapatan	-	8.149.143	-	8.149.143
<b>Rugi kotor</b>	<b>-</b>	<b>5.104.804</b>	<b>-</b>	<b>5.104.804</b>
Beban penjualan				(89.328)
Beban umum dan administrasi				(1.980.182)
Beban keuangan				(13.228.285)
Keuntungan (kerugian) lain-lain - bersih				925.097
Rugi sebelum pajak				(9.267.894)
Manfaat pajak penghasilan				(31.996.274)
Rugi bersih				(41.264.168)
Rugi komprehensif tahun berjalan				(41.264.168)
Rugi bersih				(41.264.168)
<b>Jumlah</b>				<b>(41.264.168)</b>

**31. KOMITMEN**

Selain perikatan dan komitmen yang telah diungkapkan di atas, Perusahaan memiliki perikatan dan komitmen kontrak pekerjaan yang masih berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 9 Maret 2020, Perseroan mendapatkan kontrak pekerjaan Pembangunan *Header* baru untuk *utility water supply ke new site office, new laboratorium, new HSSE office, workshop / warehouse* dan *new apartment* RDMP RU V Balikpapan dari PT Pertamina (Persero), dengan nilai kontrak sebesar Rp 15.300.000.000 untuk jangka waktu 6 bulan. Kontrak tersebut diperpanjang sampai Januari 2021 dengan tambahan nilai kontrak sebesar Rp 5.100.000.000,-.
2. Kontrak No. 904242, Pekerjaan *Call Out Fabrication and Construction Services* dari Santos Energy Pty. Ltd. dengan harga kontrak sebesar Rp 8.668.215.488 jangka waktu September 2019 sampai dengan September 2020.

**32. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI**

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

**a. Sifat hubungan dengan pihak berelasi**

Pihak berelasi	Sifat hubungan dengan pihak berelasi	Jenis Transaksi
- PT Royal Victoria Hotel	Kesamaan pemegang saham	Utang berelasi

**b. Saldo dengan pihak berelasi**

Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2020	2019
<b>Utang lain-lain</b>		
Piutang Karyawan	529.066	-
Piutang Direksi	-	1.550.670
<b>Jumlah</b>	<b>529.066</b>	<b>1.550.670</b>
	2020	2019
<b>Utang lain-lain</b>		
PT Royal Victoria Hotel	25.153.723	56.022.968
<b>Jumlah</b>	<b>25.153.723</b>	<b>56.022.968</b>

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**33. ASET DALAM MATA UANG ASING**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan mempunyai aset dalam mata uang asing sebagai berikut (dalam satuan penuh, kecuali jumlah setara Rupiah):

Aset	2020		2019	
	Mata uang asing	Saldo Rupiah	Mata uang asing	Saldo Rupiah
Kas dan Bank				
USD	991	13.980	993	13.846
Piutang usaha batu bara				
USD	147.274	2.077.307	146.915	2.047.263
Piutang usaha jasa konstruksi & <i>land clearing</i>				
USD	421.392	5.943.728	420.364	5.857.766
<b>Jumlah</b>		<b>8.035.014</b>		<b>7.918.876</b>

**34. MANAJEMEN RISIKO**

Manajemen risiko dapat dikelompokkan menjadi manajemen risiko modal dan manajemen risiko keuangan.

a. Manajemen Risiko Modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perusahaan terdiri dari liabilitas termasuk, utang pihak berelasi (Catatan 15), beban yang masih harus dibayar (Catatan 16), kas dan setara kas (Catatan 5) dan modal tersedia bagi para pemegang saham dari entitas induk, terdiri dari modal saham (Catatan 18), tambahan modal disetor (Catatan 19), dan saldo laba sebagaimana diungkapkan dalam laporan keuangan.

Direksi secara berkala melakukan review struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari review ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Rasio gear pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Utang bank (Catatan 14)	1.668.192	-
Beban yang masih harus dibayar (catatan 16)	80.283	86.287
Sub-jumlah	1.748.475	86.287
Dikurangi:		
Kas dan bank (catatan 5)	346.861	1.093.848
Kas (Utang) neto	(1.401.614)	1.007.561
Jumlah ekuitas	40.391.503	14.328.227
Rasio gear	4%	386%

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing, risiko tingkat bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan dan entitas anak beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Direksi.

i. Manajemen Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko di mana nilai wajar atas arus kas kontraktual masa depan dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Saat ini kegiatan operasi usaha Perusahaan didominasi oleh mata uang fungsional Perusahaan, yaitu mata uang Rupiah.

ii. Manajemen Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar arus kas kontraktual masa depan dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Dalam pengelolaan risiko suku bunga, Perusahaan mengelola tingkat suku bunga dengan mengevaluasi tren pasar. Manajemen juga melakukan penilaian antara suku bunga yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan, baik perbankan maupun lembaga pembiayaan untuk mendapat tingkat suku bunga paling baik, dan secara teratur menyiapkan proyeksi arus kas untuk pembayaran pinjaman terkait.

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**34. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)**

a. Manajemen Risiko Modal (lanjutan)

iii. Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan pelanggan memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Perusahaan. Saat ini transaksi Perusahaan dilakukan dengan pelanggan yang memiliki kredibilitas baik dan manajemen secara berkala melakukan pemantauan terhadap umur saldo piutang yang dimiliki.

Berikut ini eksposur maksimum risiko kredit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

<u>Kredit dan piutang</u>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Kas dan bank	346.861	1.093.848
Piutang usaha	4.770.791	1.599.376
Piutang lain-lain	529.066	1.550.670
Jaminan pelaksanaan pekerjaan	-	737.700
<b>Jumlah</b>	<b>5.646.718</b>	<b>4.981.593</b>

iv. Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul karena kurangnya likuiditas Perusahaan untuk menutup kewajiban jangka pendek yang dimiliki.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas serta aset lancar lainnya yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak fluktuatif arus kas. Perusahaan memastikan memiliki akses pada setiap saat yang untuk dapat memperoleh pinjaman (termasuk kepada pihak berelasi) dengan biaya pendanaan yang kompetitif serta persyaratan pendanaan yang baik.

Berikut ini jadwal jatuh tempo liabilitas Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskonto pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	<b>2020</b>			<b>Jumlah</b>
	<b>&lt; 1 tahun</b>	<b>1 - 2 tahun</b>	<b>&gt; 2 tahun</b>	
Liabilitas:				
Utang bank	1.668.192	-	-	1.668.192
Biaya yang masih harus dibayar	80.283	-	-	80.283
<b>Jumlah</b>	<b>1.748.475</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.748.475</b>

iv. Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

	<b>2019</b>			<b>Jumlah</b>
	<b>&lt; 1 tahun</b>	<b>1 - 2 tahun</b>	<b>&gt; 2 tahun</b>	
Liabilitas:				
Biaya yang masih harus dibayar	86.287	-	-	86.287
<b>Jumlah</b>	<b>86.287</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86.287</b>

Estimasi nilai wajar instrumen keuangan

Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, termasuk kas setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, dan akrual diperkirakan mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek. Nilai tercatat pinjaman bank, liabilitas sewa pembiayaan, dan utang obligasi dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun juga mendekati nilai wajarnya karena dampak pendiskontoan tidak signifikan.

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**34. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)**

Estimasi nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan estimasi nilai wajar dari instrumen keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	Nilai Wajar	Nilai Wajar
Aset keuangan :		
Kas dan setara kas	346.861	1.093.848
Piutang usaha	4.770.791	1.599.376
Piutang lain-lain	529.066	1.550.670
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	618.120	1.859.442
<b>Jumlah</b>	<b>6.264.838</b>	<b>6.103.335</b>
Liabilitas keuangan :		
Utang pihak berelasi	25.153.723	56.022.968
<b>Jumlah</b>	<b>25.153.723</b>	<b>56.022.968</b>

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

Nilai wajar dari pinjaman jangka panjang dinilai menggunakan *discounted cash flows* berdasarkan suku bunga efektif terakhir yang berlaku untuk masing-masing pinjaman yang diutilisasi. Nilai wajar utang obligasi diestimasi menggunakan nilai kuotasi pasar terakhir.

**35. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF**

Berikut ini adalah beberapa Standar Akuntansi Keuangan, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan dan amendemen yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun 2020:

- Amendemen PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan", Amendemen PSAK No 55: "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", Amendemen PSAK No. 60: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", dan Amendemen PSAK No. 73: "Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2", berlaku efektif 1 Januari 2021.

Amendemen ini menjelaskan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 diadopsi dari IFRS tentang Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2

- Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian "10 persen" untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan", berlaku efektif 1 Januari 2022.

Amendemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli.

- Amendemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang", berlaku efektif 1 Januari 2023 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amendemen menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan liabilitas sebagai lancar atau tidak lancar.

Manajemen masih melakukan persiapan dalam penerapan standar baru tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perusahaan pada saat efektif, dan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan Perusahaan masih diestimasi sampai tanggal laporan keuangan.

**PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**36. PERISTIWA PENTING LAINNYA**

Dampak Covid-19

Operasi Perusahaan telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh penyebaran virus Covid-19 yang kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Efek virus Covid-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk efek terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Efek masa depan Covid-19 terhadap Indonesia dan Perusahaan masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah infeksi Covid-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan Perusahaan.

Undang-Undang Cipta Kerja

Pada bulan Februari 2021, Pemerintah resmi mengundang 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya telah disahkan pada tanggal 2 November 2020 sebagai Undang-Undang No. 11/2020. Pada saat laporan keuangan diotorisasi, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perusahaan.

**33 TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2021.